

Tajuk

Memerangi Kejahatan Luar Biasa

TIGA peristiwa besar mengawali tahun 2016. Hingga kini perkembangan peristiwa itu terus bergulir dan menjadi perhatian publik.

Kasus korupsi, terorisme, dan narkoba menjadi luar biasa karena kejahatan tersebut memungkinkan membinasakan satu-dua generasi mendatang.

Aksi terorisme nyata menghilangkan saudara-saudara kita yang awam dengan gerakan radikal.

Kini, sindikat bandar narkoba dicurigai terkait dengan pendanaan aksi terorisme dan pencucian uang.

Perputaran uang hasil transaksi narkoba memang fantastis. Seorang gembong narkoba yang tengah mendekam di penjara mampu mengendalikan dana Rp 17 miliar.

Perang terhadap narkoba menjadi harga mati, mematikan perilaku korup menjadi keharusan, dan meredakan gerakan radikal adalah keniscayaan.

Cabik Lunik

Pendangkalan Politik

PETANI tengah sibuk menghadapi berbagai kesulitan yang datang menyerbu tak henti.



UDO Z KARZI

Saat rakyat menderita menemui berbagai musibah yang datang beruntun dan tak henti, legislator malah sibuk memperjuangkan uang purnabakti, uang pensiun, uang pengabdian, uang jasa, uang terima kasih, uang kehormatan atau uang apa pun yang diatur atau tidak diatur perundang-undangan.

Mamak Kerut membatin, bagaimana mungkin pejabat dan politisi itu lupa dengan kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan yang masih menghinggapi kebanyakan masyarakat negeri ini?

Kritik tetaplah banyak, tetapi hampir sama sekali tak berarti. Koruptor, manipulator, dan berbagai pelaku kejahatan besar atau kecil tetap saja berkeliaran.

Kebiasaan menghadapi masalah dengan monokausal ini merupakan bentuk pendangkalan dan pemiskinan politik. Model pendekatan ini adalah adik karung pragmatisme yang mewarisi mentalitas dan cara berpikir produk sistem pendidikan yang menghendaki hasil segera.

"Kita ini suka meremehkan segala sesuatunya. Ala gampang. Kalau sudah begitu, terabas aja semua. Etika, moral, nilai, norma, kepantasan, bahkan peraturan perundang-undangan tak berarti apa-apa. Begitukah?" tanya Udiien. Indah!

SIAPA pun, warga negara mana pun pasti mengharapkan nilai tukar mata uangnya stabil. Tak terkecuali kita warga Indonesia mengimpikan rupiah bisa stabil dan berdaulat di negara kita bahkan di dunia sekalipun.

Penyebab utama yang kerap kita dengar adalah karena faktor eksternal sehubungan dengan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Fed.

Dengan sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar rupiah ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran. Ini artinya, apabila permintaan terhadap dollar AS lebih tinggi, secara alamiah dollar AS akan menguat.

Namun, masalahnya tentu tak sesederhana itu. Sejak 2011, kondisi

di pasar valuta asing (valas) kita diwarnai oleh lebih tingginya permintaan valas, terutama dollar AS, daripada pasokannya.

Repotnya, guna memenuhi kebutuhan valas di dalam negeri, sekitar 80 persen pelaku pasar masih bertransaksi di pasar spot atau melakukan penjualan dan pembelian secara tunai atau langsung.

Selain itu, baru sekitar 26 persen pelaku transaksi valas yang melakukan lindung nilai (hedging). Tentu saja, kondisi seperti ini dapat menyebabkan permintaan valas melonjak dalam suatu waktu dan pelaku pasar menjadi rentan terhadap risiko nilai tukar yang bergejolak.

Simbol kedaulatan

Selain kedua faktor di atas, secara geoekonomi kita juga melihat kecenderungan meningkatnya pemakaian mata uang asing, khususnya dollar AS, dalam berbagai transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Quo Vadis Daerah Perbatasan

Riza Murtazam Luthy
Pelle Itri, alumnus Pascasarjana UII Yogyakarta

KONDISI infrastruktur di wilayah perbatasan cenderung tertinggal dibandingkan di pusat kota. Tak heran jika akhir-akhir ini pemerintah mengalokasikan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Selama ini, keunggulan daerah perbatasan kurang tereksplorasi dengan baik. Akibatnya, potensinya yang luar biasa tidak menjadi daya tarik bagi sejumlah pihak untuk mengembangkannya.

Ada tiga kategori usaha di daerah perbatasan yang dapat diolah, baik kegiatan usaha primer (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan), sekunder (industri rumah tangga dan agroindustri), maupun tersier (jasa pelayanan, jasa konstruksi, dan jasa perdagangan).

Program PKBI

Dalam rangka mendorong investasi di daerah perbatasan, pemerintah meluncurkan konsep program pembangunan kawasan beranda Indonesia (PKBI). Program ini diharapkan mampu mengangkat "derajat" daerah perbatasan sebagai beranda negara yang berdaulat, berdaya saing, dan

aman. Pemerintah genap mengubah pandangan terhadap daerah perbatasan.

Menurut Said (2012), sejak 2008 terjadi perubahan perspektif bahwa pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan bukan lagi beranda belakang negara yang kurang memiliki peran dan kontribusi.

Dengan dibantuannya sejumlah aset, kebutuhan dasar, sarana dan prasarana transportasi, serta konektivitas antar pulau di daerah perbatasan, maka fokus utama pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran bisa terwujud.

Dengan dibantuannya sejumlah aset, kebutuhan dasar, sarana dan prasarana transportasi, serta konektivitas antar pulau di daerah perbatasan, maka fokus utama pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran bisa terwujud.

Pembangunan Partisipatif

Beragam konflik kerap menghinggapi sejumlah daerah perbatasan di Indonesia. Akhirnya konflik-konflik tersebut tidak terlepas dari fakta

Transaksi mata uang asing di wilayah NKRI yang dilakukan antarpenduduk Indonesia secara nonbank jumlahnya cukup tinggi.

Tingginya transaksi dalam dollar atau "dolarisasi" tersebut telah merambah ke segala sektor ekonomi, mulai dari sektor migas, pelabuhan, tekstil, manufaktur, hingga perdagangan.

Pengalaman beberapa negara di Amerika Latin, Karibia, dan Pasifik membuktikan bahwa sikap permisif pada penggunaan mata uang asing di dalam negeri pada akhirnya justru menggeser peran mata uang lokal.

Beberapa kebijakan perlu ditempuh untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas. Pertama, upaya melakukan pendalaman pasar keuangan. Langkah ini perlu dilakukan agar pelaku pasar memiliki lebih banyak pilihan instrumen dan kemudian dalam bertransaksi sehingga mengurangi risiko.

khususnya di sektor korporasi. Utang luar negeri swasta yang tidak terkendali akan meningkatkan risiko nilai tukar, likuiditas, dan terlalu banyak berutang (over leveraging).

Ketiga, dan yang tak kalah pentingnya, adalah perlunya masyarakat untuk mendukung penggunaan mata uang rupiah untuk bertransaksi di wilayah NKRI.

Menjadikan rupiah sebagai mata uang yang stabil dan berdaulat memang bukan langkah mudah. Tekanan terhadap rupiah ditentukan oleh banyak hal yang saling berkelindan.

Kita pernah memiliki pengalaman saat lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Salah satu alasan yang muncul pada waktu itu adalah karena rupiah tidak lagi digunakan untuk bertransaksi di sana.

timbul lantaran tergesernya aspek sosial, budaya dan kearifan lokal oleh pelbagai kepentingan elite.

Solusi percepatan pembangunan dan perbaikan kualitas hidup orang-orang yang bermukim di daerah perbatasan semestinya bercorak partisipatif. Mereka harus terlibat dalam mengatasi problematika yang melingkupi diri dan lingkungannya.

Implementasi program PKBI selayaknya disinergikan dengan program lain sebagai kesatuan sistem pengembangan potensi daerah perbatasan. Pendekatan pengembangan daerah perbatasan juga harus diarahkan pada perspektif investasi dengan skenario hasil investasi jangka pendek dan menengah.

Untuk mewujudkan hal di atas, diperlukan political will pemangku kebijakan dan kerja keras stakeholder. Dengan demikian, selain meyakini bahwa daerah perbatasan merupakan garda terdepan yang menjaga ketahanan NKRI, publik juga menganggap bahwa pengelolaan sumber daya alam dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia tidak hanya terkonsentrasi di Jawa.

Suara Pembaca

Rendahnya Minat Baca di Negeri Ini

KITA dihadapkan pada kenyataan serius (sobering fact). Kondisi minat baca masyarakat Indonesia sangat memperhatikan.

Ketiga, malas dan minimnya motivasi dari lingkungan sekitar. Keempat, rendahnya kemampuan masyarakat untuk membeli buku, karena masyarakat kita masih terpaud dengan kebutuhan-kebutuhan dasar.

Kelima, ketersediaan bahan bacaan yang sedikit atau sulit untuk mengakses buku. Rendahnya minat baca masyarakat

Indonesia berdampak sistemik dan masif pada berbagai lini dunia perbukuan yang meliputi: penulis, produksi dan kualitas buku, penerbit, dan perpustakaan (universitas, daerah, nasional dan umum). Jumlah penulis dan buku yang diproduksi juga sangat rendah.

Dian Permana
Kemiling, Bandar Lampung

Rajuk

- DPR perketat penyadapan KPK, nanti harus seizin Dewan Pengawas. Dan, kian amanlah para tikus menggogoti negeri. Soal kereta cepat, Fadli Zon menyabet Jokowi menabrak aturan. Kasian aturan, pingsan berkalkali.

Footer containing contact information for Fajar Sumatera, including address, phone numbers, and social media links for various branches like Lampung Barat and Lampung Tengah.